



# Laporan Kinerja

Kecamatan Krian  
Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Krian Tahun 2022. LKjIP Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Krian dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Krian telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sidoarjo, Februari 2023

**CAMAT KRIAN**



**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198003221998101001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Sidoarjo, Februari 2023

**KAMAT KRIAN**  
  
**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198003221998101001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	7
BAB I_PENDAHULUAN.....	8
1_Kedudukan.....	8
2_Aspek Strategis Organisasi .....	10
BAB II_PERENCANAAN KINERJA .....	12
A_Visi dan Misi .....	12
B_Tujuan dan Sasaran.....	12
C_Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	12
D_Perencanaan Anggaran Tahun 2022.....	13
BAB III_AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A_Pengukuran Kinerja.....	15
B_Analisis Capaian Kinerja .....	16
C_Realisasi Anggaran.....	30
D_Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	33
BAB IV_PENUTUP .....	34
A_Kesimpulan.....	34
B_Tindak Lanjut.....	34
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	35
A_Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	35
B_Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	36
C_Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	36
D_Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022 .....	37
E_Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo .....	9
Tabel 1.2	Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah .....	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.2	Rincian anggaran pada tahun 2022 .....	13
Tabel 3.1	Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	15
Tabel 3.2	Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	15
Tabel 3.3	Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan krian Tahun 2022.....	16
Tabel 3.4	Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022 .....	18
Tabel 3.5	Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terhadap target akhir Renstra.....	19
Tabel 3.6	Realisasi kinerja program dan kegiatan .....	20
Tabel 3.7	Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan krian Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.8	Realisasi kinerja program dan kegiatan .....	29
Tabel 3.10	Realisasi kinerja dan keuangan.....	30
Tabel 3.11	Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022.....	33

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1 Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022.....	17
Grafik 3.2.2 Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022 .....	19
Grafik 3.2.3 Perbandingan kinerja sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2022 VS 2022 ..	19
Grafik 3.2.4 Realisasi kinerja sasaran kedua meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan krian Tahun 2022 .....	28

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melaksanakan misi 5 Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha.”

Untuk mendukung ketercapaian misi 1 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, memiliki tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis serta 6 (enam) Indikator Sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Capaian sasaran strategis 1, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Prosentae Permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan capaian target 100% atau Sangat Berhasil.
- Capaian sasaran strategis 2, terdapat 5 indikator sasaran yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian target 114,9%, Nilai SAKIP Kecamatan Krian dengan capaian 94,21%, Nilai RB Kecamatan Krian dengan capaian 56,17%, Nilai IPP Kecamatan Krian dengan capaian 78,30%, dan Serapan Anggaran Perangkat Daerah dengan capaian target 104,6%.

Berkaitan dengan capaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran strategis yang mencakup 6 indikator sasaran, diketahui mencapai target Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah Sangat Baik.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1 Kedudukan

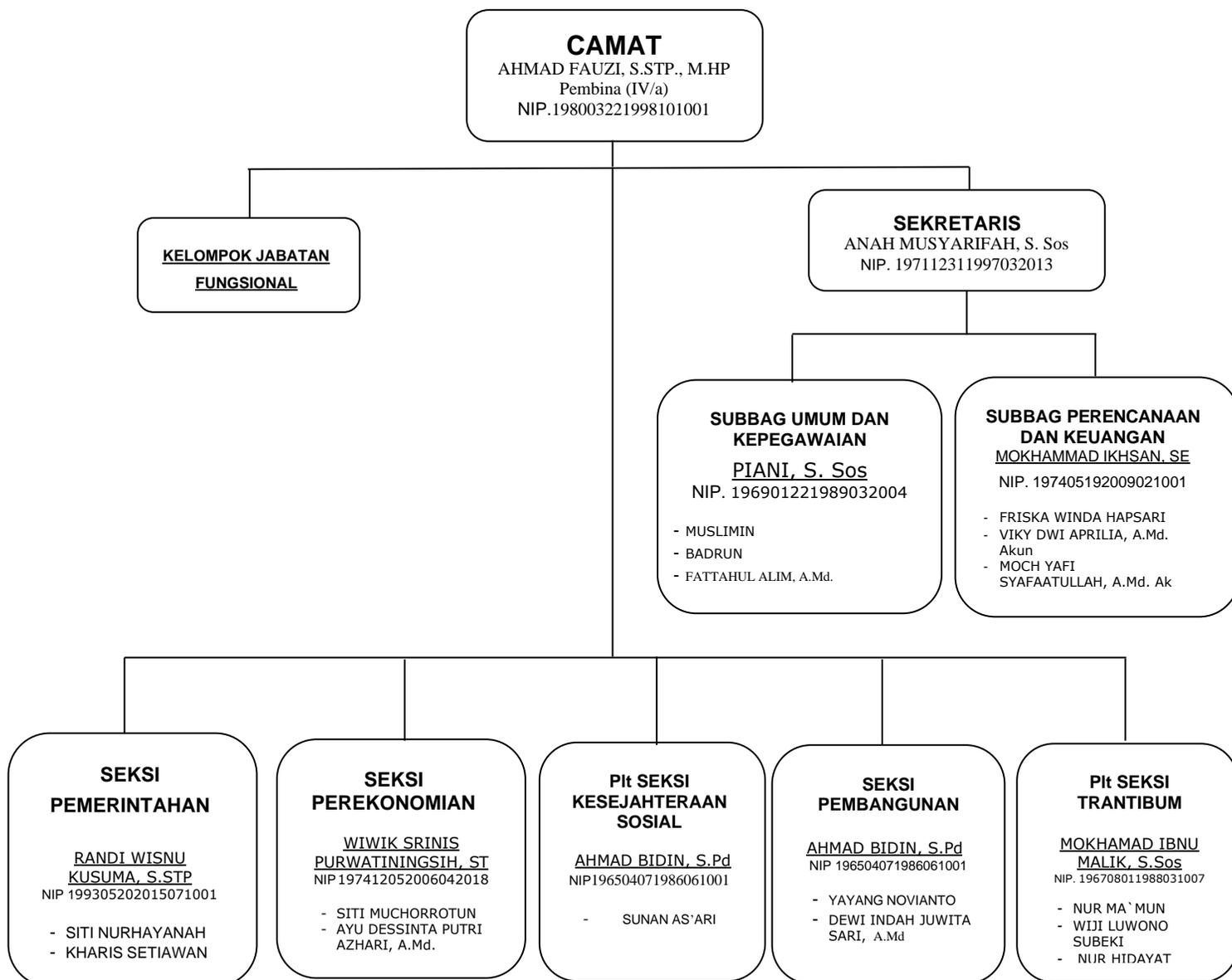
---

**Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kewilayahan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat. Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.



**Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 32 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Data ASN Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kecamatan Krian	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	9
4	Pelaksana	21
5	Jabatan Fungsional Ahli	0
6	Jabatan Fungsional Terampil	0

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan
2	Profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki	Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki	Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki
3	Pendayagunaan potensi	Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Pendayagunaan potensi belum optimal dikarenakan hal tersebut bukan kewenangan kecamatan
4	Kapasitas aparat	Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai tupoksi	Kurangnya jumlah dan kapasitas aparat sehingga terdapat aparat yang bekerja tidak sesuai tupoksi
5	Petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Kurangnya jumlah petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Jumlah petugas perlindungan masyarakat tidak sebanding dengan jumlah seluruh masyarakat
6	Pembinaan pemuda	Belum adanya pembinaan pemuda untuk mengatasi permasalahan trantibum	Kurangnya pelatihan dan pembinaan pemuda untuk mengatasi permasalahan trantibum
7	Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah	Belum akuratnya data potensi seluruh desa\Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah	Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat desa tentang desa maju
8	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya pembinaan terhadap masing-masing desa tentang indeks desa membangun

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik.
2. Adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam.
3. Ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa.
4. Adanya pengembangan kawasan by pass krian.
5. Kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan.
6. Kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa.
7. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### **A** *Visi dan Misi*

---

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha”.

### **B** *Tujuan dan Sasaran*

---

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha” dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital” yang dituju. Sehingga **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”
  - a. Sasaran 1 “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”
  - b. Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

### **C** *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

---

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran **Kecamatan Krian** Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	80%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Sangat Baik b. BB (78)

	Pemerintahan Kecamatan	B. Nilai SAKIP Kecamatan Krian C. Nilai RB D. Nilai IPP E. Serapan anggaran Perangkat Daerah	c. 27,22 (75%) d. 4,01 (A-)  e. 90%
3	Meningkatnya Penerimaan Retribusi	Jumlah Retribusi Penyewaan Bangunan	Rp. 50.750.000

Pada Indikator kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra, pada indikator Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi dengan target 80%, dengan pertimbangan capaian tahun lalu N/A dan target Renstra tahun 2022 68,42%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 80%.

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Camat Krian untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikoordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

#### **D** Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 11.841.845.266 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 11.390.924.968 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Rincian anggaran pada tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.088.150.243	Rp. 4.903.462.745
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.061.539.545	Rp. 966.677.605
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 548.218.167	Rp. 622.226.207
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.023.824.400	Rp. 1.951.615.700
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.015.400.000	Rp. 1.324.933.143
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 185.685.627	Rp. 138.135.627
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 78.850.000	Rp. 78.850.000
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 789.267.600	Rp. 299.694.960
3			PROGRAM	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 845.897.794	Rp. 857.323.658

		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 68.214.000	Rp. 45.364.000
5		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	Rp. 6.326.500	Rp. 6.083.333
6	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 130.471.390	Rp. 196.557.990
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 87.816.540	Rp. 21.732.040
<b>Total Anggaran</b>				<b>Rp. 11.841.845.266</b>	<b>Rp. 11.390.924.968</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### **A** **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	0 ≤ 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	90,98%	Sangat Baik
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Sangat Baik

## **B Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

### **1. Sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kerjanya sebesar 90,98%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

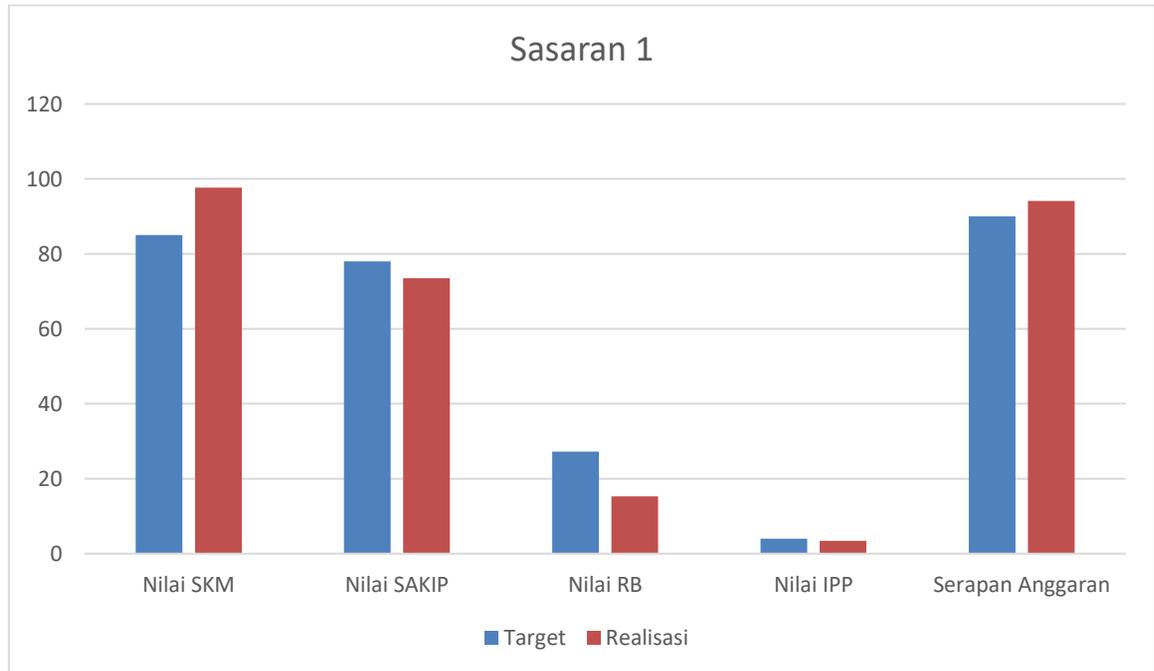
Tabel 3.3

Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan krian Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Krian	85	97,7	114,9%
		B. Nilai SAKIP Kecamatan Krian	78	73,49	94,21%
		C. Nilai RB	27,22	15,29	56,17%
		D. Nilai IPP	4,01	3,41	85,03%
		E. Serapan Anggaran Perangkat Daerah	90	94,14	104,6%

Grafik 3.2.1

Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 (Lima) indikator. Indikator pertama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodic. Indikator kedua yaitu Nilai SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Indikator ketiga Nilai Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Indikator keempat Nilai Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indikator kelima adalah Serapan anggaran perangkat daerah adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah/SKPD kepada DPRD/kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator pertama Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dapat direalisasi sebesar 97,7. Kemudian indikator kedua Nilai SAKIP dapat direalisasi sebesar 73,49. Indikator ketiga Nilai Reformasi Birokrasi (RB) direalisasi sebesar 15,29. Selanjutnya indikator keempat Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) direalisasi sebesar 3,41. Terakhir indikator kelima yaitu Serapan anggaran perangkat daerah dapat direalisasi sebesar 94,14%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika ada kendala.
2. Lebih sering mengadakan pembinaan dan evaluasi berkala

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Sering adanya trouble jaringan dari pusat.
2. Belum meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun terdapat penurunan pada indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh belum adanya ide inovasi pada Kecamatan Krian. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

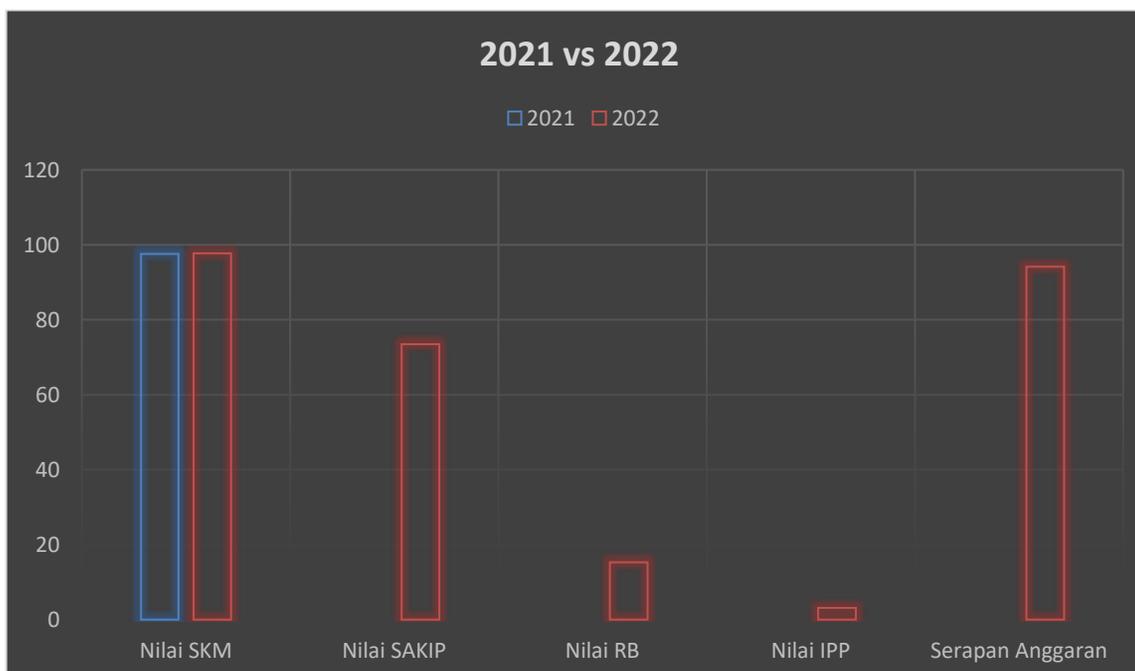
Tabel 3.4

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Krian	97,59	97,7
		B. Nilai SAKIP Kecamatan Krian	N/A	73,49
		C. Nilai RB	N/A	15,29
		D. Nilai IPP	N/A	3,41
		E. Serapan Anggaran Perangkat	N/A	94,14

Grafik 3.2.2

Perkembangan kinerja sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022



Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

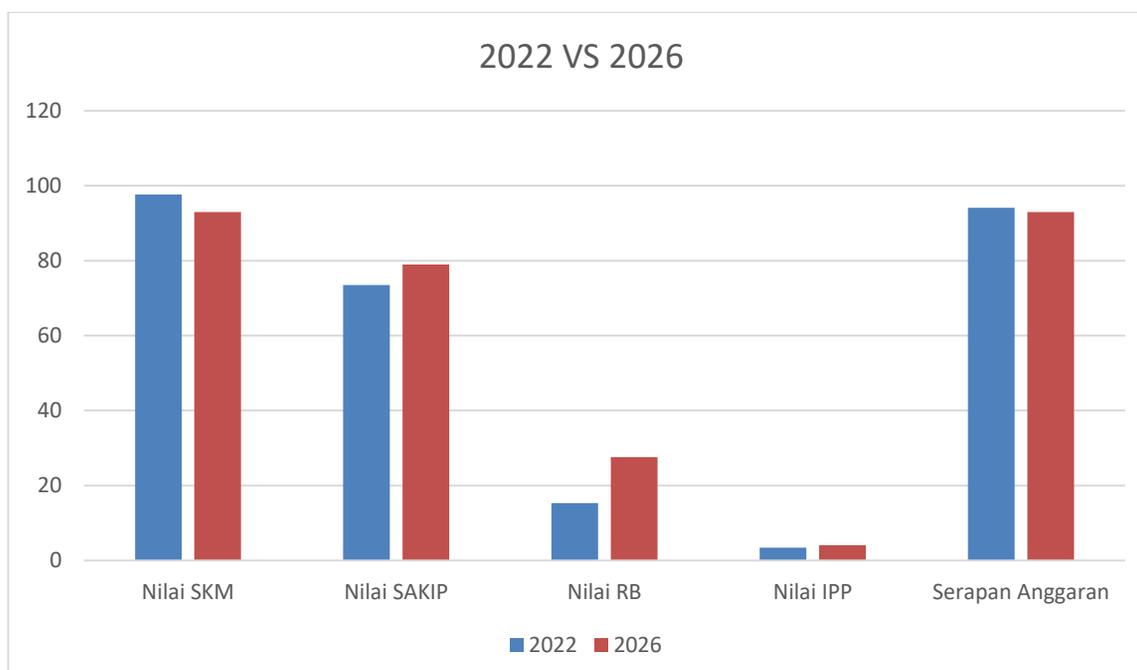
Tabel 3.5

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Krian	93	97,7	105%
		B. Nilai SAKIP Kecamatan Krian	79	73,49	93,02%
		C. Nilai RB	27,6	15,29	55,39%
		D. Nilai IPP	4,08	3,41	85,03%
		E. Serapan Anggaran Perangkat	93	94,14	101,2%

Grafik 3.2.3

Perbandingan kinerja sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2022 VS 2022



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” adalah sebesar Rp. 11.188.283.645 dengan realisasi sebesar Rp. 10.552.834.879. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengunggkit realisasi sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”.

Tabel 3.6  
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretarian	98	96	Rp. 9.768.390.400	Rp. 9.325.504.942
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase realisasi anggaran PD	90	94,14	Rp. 4.903.462.745	Rp. 4.693.702.451
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	12	12	Rp. 4.899.272.151	Rp. 4.689.520.051
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12	12	Rp. 4.190.594	Rp. 4.182.400
	<b>Administrasi Umum</b>	Nilai Survey Kepuasan	85	97,7	Rp. 966.677.605	Rp. 958.690.299

	<b>Perangkat Daerah</b>	Masyarakat (SKM)				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	11	11	Rp. 26.384.110	Rp. 26.378.030
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40	40	Rp. 130.642.792	Rp. 129.773.811
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	17667	17667	Rp. 221.000.000	Rp. 218.309.130
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	10	15	Rp. 57.634.610	Rp. 57.589.610
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2	2	Rp. 2.400.000	Rp. 2.375.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	27	27	Rp. 65.984.804	Rp. 65.941.948
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	6600	6600	Rp. 249.156.700	Rp. 248.172.770
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan b. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	98	98	Rp. 213.474.589	Rp. 210.150.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jenis BMD yang diadakan	1	13	Rp. 622.226.207	Rp. 612.316.140
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	6	10	Rp. 455.297.117	Rp. 446.143.050
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6	6	Rp. 150.500.000	Rp. 149.821.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung	1	1	Rp. 16.429.090	Rp. 16.352.090

	atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang diadakan				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	98	98	Rp. 1.951.615.700	Rp. 1.913.009.386
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2500	1400	Rp. 5.600.000	Rp. 5.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12	12	Rp. 237.000.000	Rp. 208.385.888
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	4 3 5 24	4 3 5 24	Rp. 1.709.015.700	Rp. 1.699.023.498
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	20	34	Rp. 1.324.933.143	Rp. 1.147.786.666
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia b. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	2 4 4	5 4 12	Rp. 160.300.000	Rp. 148.345.152
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	3	9	Rp. 50.000.000	Rp. 49.970.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	3	Rp. 161.600.000	Rp. 161.490.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang	2	2	Rp. 499.816.390	Rp. 497.073.519

		dipelihara/rehabilitasi				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1	Rp. 411.000.000	Rp. 248.907.995
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	100	100	Rp. 42.216.753	Rp. 42.000.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	A. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL B. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	98 98	98 98	Rp. 516.680.587	Rp. 350.388.466
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	5	8	Rp. 138.135.627	Rp. 123.726.216
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	A. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan B. Jumlah rapat koordinasi pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan C. Jumlah rapat koordinasi	5 5 8 6	8 8 11 12	Rp. 138.135.627	Rp. 123.726.216

		bidang pemerintahan yang dilaksanakan D. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan				
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	24500	24500	Rp. 78.850.000	Rp. 17.750.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	A. Jumlah pelayanan umum yang telah diterima B. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	24500 110	24500 248	Rp. 78.850.000	Rp. 17.750.000
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	A. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun B. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun C. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan			Rp. 299.694.960	Rp. 208.912.250
	Pelaksanaan Urusan	Jumlah permohonan IMB Rumah	0	0	Rp. 1.756.700	Rp. 1.756.700

	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<p>A. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya</p> <p>B. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya</p> <p>C. Jumlah monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya</p> <p>D. Jumlah monev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya</p>	<p>8</p> <p>5</p> <p>8</p> <p>5</p>	<p>18</p> <p>13</p> <p>16</p> <p>12</p>	Rp. 15.617.310	Rp. 15.599.950
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<p>A. Jumlah pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan</p> <p>B. Jumlah pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan</p> <p>C. Jumlah pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>6</p>	<p>8</p> <p>7</p> <p>10</p>	Rp. 282.320.950	Rp. 191.555.600
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	3	3	Rp. 857.323.658	Rp. 849.639.971

	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	3	3	Rp. 857.323.658	Rp. 849.639.971
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan			Rp. 31.472.500	Rp 31.425.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	A. Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang dibina B. Jumlah pelatihan masyarakat yang dilaksanakan C. Jumlah RT/RW yang memperoleh bantuan honorarium D. Jumlah RT yang memperoleh bantuan operasional			Rp. 825.851.158	Rp. 818.214.971
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	98	98	Rp. 45.364.000	Rp. 27.301.500
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	19	19	Rp. 45.364.000	Rp. 27.301.500
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	A. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa B. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	19 19	19 19	Rp. 21.314.000	Rp. 12.951.500

		Perangkat Desa				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan tentang perencanaan , penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	2	2	Rp. 24.050.000	Rp. 14.350.000
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	98 %	95 %	Rp. 6.083.333	Rp. 6.074.500
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp. 6.083.333	Rp. 6.074.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	A. Jumlah Lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional B. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan 2 Kegiatan	1 Kegiatan 2 Kegiatan	Rp. 6.083.333	Rp. 6.074.500
<b>Total</b>					Rp. 11.194.366.978	Rp. 10.558.909.379

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika ada kendala.
2. Lebih sering mengadakan pembinaan dan evaluasi berkala.

## 2. Sasaran kedua “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”.

Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”

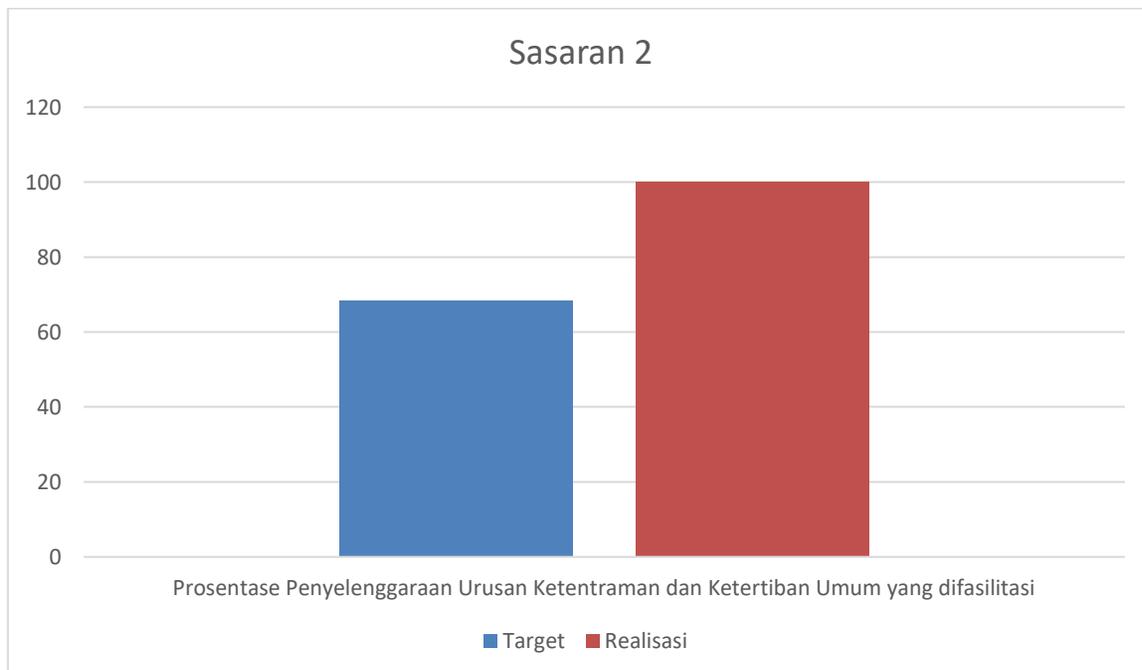
Tabel 3.7

Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan krian Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	68,42%	100 %	146,15%

Grafik 3.2.4

Realisasi kinerja sasaran kedua meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan krian Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (Satu) indikator. Indikator tersebut yaitu Prosentase Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi. Perhitungan keberhasilan indikator berasal dari jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dibagi dengan jumlah seluruh permasalahan trantibum yang masuk. Berdasarkan tabel 3.6 diatas, indikator Prosentase Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi dapat direalisasi sebesar 100%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.

2. Selalu cepat dan tanggap ketika ada laporan gangguan trantibum yang masuk.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah masyarakat atau warga masih belum paham bagaimana untuk melaporkan ke Kecamatan ketika ada gangguan Trantibum.

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran kedua “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”.

Tabel 3.8  
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	98 %	98 %	Rp. 197.082.990	Rp. 50.420.490
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang tersusun	10 laporan	10 laporan	Rp. 175.350.950	Rp. 28.775.950
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan linmas yang dilaksanakan	a 20 kegiatan b. 2 kegiatan	a 19 kegiatan b. 5 kegiatan	Rp. 141.575.000	Rp. 8.625.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp. 33.775.950	Rp. 20.150.950

	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	30 Permasalahan	30 Permasalahan	Rp. 21.732.040	Rp. 21.644.540
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	A. Jumlah permasalahan pelanggaran perda & perkada yang terdaftar B. Jumlah Monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan C. Jumlah operasi penerapan dan penegakan perda & perkada yang dilaksanakan	10 Permasalahan 1 Kegiatan 72 Kegiatan	5 Permasalahan 3 Kegiatan 72 Kegiatan	Rp. 21.732.040	Rp. 21.644.540

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran kedua “Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum”. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Memberikan arahan, sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan Bersama.
2. Melakukan Patroli rutin di seluruh kawasan wilayah Kecamatan Krian.

### **C** *Realisasi Anggaran*

Laporan pelaksanaan anggaran **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.10  
Realisasi kinerja dan keuangan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	98	96	97,95	Rp. 9.768.915.400	Rp. 9.325.504.942	95,47

	<b>AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	pelayanan kesekretariatan						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90	94,14	100	Rp. 4.903.462.745	Rp. 4.693.702.451	95,72
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	97,7	100	Rp. 966.677.605	Rp. 958.690.299	99,23
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang diadakan	1	13	100	Rp. 622.226.207	Rp. 612.316.140	98,41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	98	98	100	Rp. 1.951.615.700	Rp. 1.913.009.386	98,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	20	34	100	Rp. 1.324.933.143	Rp. 1.147.786.666	86,63
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	C. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL D. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	a. 98 b. 98	a. 98 b. 98	100	Rp. 516.680.587	Rp. 350.388.466	67,82
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan ; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	5	8	100	Rp. 138.135.627	Rp. 123.726.216	89,57
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	24500	24500	100	Rp. 78.850.000	Rp. 17.750.000	22,51
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	D. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyaraka	a. 5 b. 4 c. 0	a. 13 b. 8 c. 0	100 100 0	Rp. 299.694.960	Rp. 208.912.250	69,70 83

		tan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun E. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun F. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan						
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN</b>	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	3	3	100	Rp. 857.323.658	Rp. 849.639.971	99,10
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	3	3	100	Rp. 857.323.658	Rp. 849.639.971	99,10
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	98	98	100	Rp. 196.557.990	Rp. 50.420.490	25,58
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	20	20	100	Rp. 196.557.990	Rp. 28.775.950	16,41
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	30	30	100	Rp. 21.732.040	Rp. 21.644.540	99,60
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	98	95	96,93	Rp. 6.083.333	Rp. 6.074.500	99,85
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3	5	166,7	Rp. 6.083.333	Rp. 6.074.500	99,85
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	98	98	100	Rp. 45.364.000	Rp. 27.301.500	60,18

<b>PEMERINTAH AN DESA</b>	sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu							
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	19	19	100	Rp. 45.364.000	Rp. 27.301.500	60,18	

## **D Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

Tabel 3.11

Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	A. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Krian B. Nilai SAKIP Kecamatan Krian C. Nilai RB D. Nilai IPP E. Serapan Anggaran Perangkat Daerah	90,98%	94,92%	-4,92%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	100%	25,58 %	74,42%

### 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Indikator Sasaran Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, dan serapan anggaran perangkat daerah.

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, dan serapan anggaran perangkat daerah dapat disampaikan bahwa indikator kinerja tercapai sebesar 90,98% dan penyerapan anggaran sebesar 94,82%.

- Indikator Sasaran Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indikator prosentase permasalahan trantibum dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 100% dan penyerapan anggaran sebesar 25,58%. Efisiensi tersebut disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang terlaksana tanpa menggunakan seluruh anggaran yang ada, tetapi hanya digunakan sesuai keperluan.

## BAB IV PENUTUP

### **A** **Kesimpulan**

---

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu berhasil. Sasaran dengan kategori sangat berhasil, Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran dengan kategori berhasil, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran yang ada di Kecamatan Krian antara lain :

- Aplikasi kependudukan yang sering bermasalah sehingga menghambat kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- Kurangnya pembinaan dan evaluasi untuk sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Krian
- Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Krian belum semuanya memadai.
- Sering terjadi perselisihan di desa atau antar masyarakat.

### **B** **Tindak Lanjut**

---

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, **Kecamatan Krian** Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika ada kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan.
2. Lebih sering mengadakan pembinaan dan evaluasi berkala untuk sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Krian.
3. Memberikan arahan, sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan Bersama.
4. Melakukan Patroli rutin di seluruh kawasan wilayah Kecamatan Krian.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

#### 1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KRIAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Jabatan : **CAMAT KRIAN**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AHMAD MUHDOR, S.IP.**  
Jabatan : **BUPATISIDOARJO**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, Februari 2022

Pihak Kedua,  
**BUPATISIDOARJO**  
  
**AHMAD MUHDOR, S.IP.**

Pihak Pertama,  
**CAMAT KRIAN**

  
**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina.  
NIP 198003221998101001

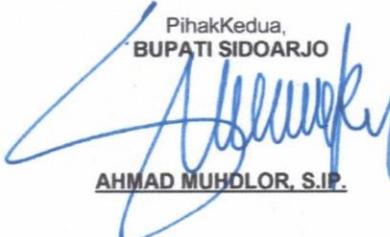
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KRIAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	SANGAT BAIK
		Nilai SAKIP	BB
		Nilai RB	27,22
		Nilai IPP	A-
		Prosentase Penyerapan Anggaran	90%
2	Meningkatnya penerimaan retribusi	Jumlah Retribusi Penyewaan Bangunan	Rp. 50.750.000

**JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.737.132.355
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.053.803.227
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	845.897.794
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	130.471.390
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.326.500
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.214.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.841.845.266</b>

Sidoarjo, Februari 2022

PihakKedua,  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**AHMAD MUHDLOR, S.IP.**

Pihak Pertama,  
**CAMAT KRIAN**

  
**AHMAD FAUZI, S.STP., M.HP**  
Pembina.  
NIP 198003221998101001

[https://drive.google.com/file/d/1FFHfZ8E550j9JAMbqnHVun\\_JI0AfErrG/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1FFHfZ8E550j9JAMbqnHVun_JI0AfErrG/view?usp=share_link)

**B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

[https://drive.google.com/file/d/1OmZde\\_i8jW0\\_HfjPHkWW-bh7PaVquTcB/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1OmZde_i8jW0_HfjPHkWW-bh7PaVquTcB/view?usp=share_link)

**C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022**

[https://drive.google.com/file/d/1CPYI4c-w5XGid4bNDKhL7yqchabUkWLT/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CPYI4c-w5XGid4bNDKhL7yqchabUkWLT/view?usp=share_link)

**D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022**

---

[https://drive.google.com/file/d/1Sx-h-04y4Q0UcsNlXlhu3KKRtgmQG44I/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Sx-h-04y4Q0UcsNlXlhu3KKRtgmQG44I/view?usp=share_link)

**E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022**

---

Dokumentasi Penghargaan yang diterima